



Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gutmann dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019

Abstract

Democracy is very closely related to politics. If the definition is drawn, politics is the interaction between government and society in making a policy in a state. In practice, politics and democracy are often used as tools and games for those in the seat of power. The struggle for the seat of power is always colored by dropping each other's identity from political opponents in various ways or we usually bear as the Politics of Identity. These problems have a form that is varied as well as terrible, the impact of which is also unimaginable. Amy Gutmann (2003) has discussed identity politics and argues that not always identity politics aims to bring down political opponents. Amy divides identity politics into three things, namely Good, Ugly and Bad. This study will identify identity politics that will be used by presidential candidates and vice-presidential candidates in the upcoming political elections in 2019.

Demokrasi sangat berkaitan erat dengan politik. Jika ditarik pengertiannya, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan dalam bernegara. Dalam praktiknya, politik maupun demokrasi seringkali digunakan sebagai alat dan permainan bagi mereka yang berada di kursi kekuasaan. Perebutan kursi kekuasaan ini selalu diwarnai dengan saling menjatuhkan identitas dari lawan politiknya dengan berbagai cara atau biasa kita dengar dengan sebutan Politik Identitas. Permasalahan tersebut memiliki wujud yang bervariasi sekaligus mengerikan, yang dampak dari padanya juga tak terbayangkan. Amy Gutmann (2003) telah membahas mengenai politik identitas dan berpendapat bahwa tidak selamanya politik identitas itu bertujuan untuk saling menjatuhkan lawan politiknya. Amy membagi politik identitas menjadi tiga keadaan, yakni *Good*, *Ugly* dan *Bad*. Penelitian ini akan mengidentifikasi politik identitas yang akan digunakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi politik pemilihan umum tahun 2019 mendatang.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik Identitas, Pemilihan Umum, Pesta Politik

Oleh:

Nada Oktavia dan Hairul Dharma Widagdo

*Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
nadaoktavia12@yahoo.co.id*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.¹ Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Hakikat dari demokrasi yakni sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat.²

Beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Gagasan yang memandang demokrasi sebagai suatu sistem untuk memproses konflik di mana partai yang kalah dalam pemilu tidak berusaha merusak rezim demi mencapai tujuannya, tetapi bersedia menerima kenyataan dan menunggu putaran pertarungan dalam pemilihan umum. Jika dilihat dari pengertian tersebut, jelas terlihat bahwa seolah-olah politik maupun demokrasi

merupakan alat dan permainan bagi mereka yang berada di kursi kekuasaan yang paling tinggi yakni pemerintahan.

Konteks tulisan ini, mengarah pada perebutan kursi kekuasaan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 2019 mendatang.³ Demokrasi yang dimaksud penulis sangat berkaitan erat dengan yang namanya politik.⁴ Dalam perjalanan politik di Indonesia, banyak dari kalangan awam yang berpendapat bahwa politik itu sesuatu yang sangat jahat dan sesuatu yang berbahaya. Pada dasarnya politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Jika kita melihat kondisi politik Indonesia saat ini, yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji-janji yang dulu di buat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurus kursi jabatannya.⁵

Dilansir oleh *validnews.id*, pertarungan antarkandidat telah menggunakan cara-cara kampanye hitam yang pada dasarnya sangat buruk bagi proses demokratisasi

1 Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, *pertama*, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*). Dan *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

2 Dwi Sulisworo, dkk, *Demokrasi*, (Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan: Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012), hlm. 4.

3 Anyualatha Haridison, *Pembangunan Politik: Demokrasi, Governance Dan Supremasi Hukum*, (Jurnal Administrasi Publik, FISIP Universitas Palangka Raya, 2013), hlm. 3.

4 Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut penulis, politik merupakan sebuah cara dalam membuat suatu kebijakan dari suatu negara.

5 Dian Rosdiani, *Kondisi Politik Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/dianrosdiani/5511230e8133117341bc61a6/kondisi-politikindonesia>, diakses pada 30 September 2018.

Indonesia. Bermula pada semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi yang kini diikuti dengan penggunaan media sosial dalam kampanye politik, para calon kepala daerah telah semakin mudah mensosialisasikan berbagai visi dan misi serta rencana program kerja mereka kepada para pemilih. Namun pada saat yang bersamaan, berbagai isu termasuk berbagai isu hitam mengenai lawan politik, juga dengan semakin mudah untuk disebarkan.

Penggunaan isu SARA demi kepentingan kemenangan juga dapat dengan semakin mudah disebarkan. Celakanya, para pemilih ternyata masih dapat dengan mudah menerima berbagai kampanye hitam yang digunakan beberapa kelompok pendukung calon kepala daerah, tanpa melakukan penyaringan dengan lebih teliti dan kritis.⁶ Konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.

Akhir-akhir ini masalah identitas menjadi sebuah *tranding* bahkan fenomena yang seringkali kita dengar di telinga kita. Permasalahan tersebut memiliki wujud yang bervariasi sekaligus mengerikan, yang dampak dari padanya juga tak terbayangkan.⁷ Identitas yang seringkali kita dengar pasti selalu dikaitkan dengan yang

namanya politik identitas. Agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat utama dalam menjalankan politik identitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Huntington, bahwa identitas-identitas primordial memang menjadi faktor utama dalam gesekan-gesekan antar peradaban. Di Indonesia, sebuah negara yang menempatkan urusan agama sebagai bagian dari urusan negara, agama seringkali menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap kelompok berbeda.⁸

Penelitian yang membahas tentang politik identitas sudah mulai banyak ditemukan. Seperti yang sudah diteliti oleh Suryani dan Ana Sabhana Azmy dalam penelitiannya yang berjudul "Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru)". Pada penjelasannya, penelitian ini melihat bagaimana penguatan politik identitas etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru.

Terdapat dua hal penting yang dapat di telaah, *pertama* yakni dapat dilihat adalah orientasi politik etnis Tionghoa di Indonesia setelah orde baru karena menurut catatan sejarah mengenai orientasi politik etnis Tionghoa di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan periodisasi kekuasaan politik di Indonesia. *Kedua*, konsep multikulturalisme dapat dilihat bahwa menguatnya identitas politik etnis Tionghoa dalam ranah politik adalah dengan melihat fenomena bagaimana sikap keterbukaan masyarakat umum yang ditunjukkan pada etnis Tionghoa. Meski masih ada gesekan, namun biasanya gesekan tersebut terjadi karena konflik yang disebabkan oleh perilaku personal, bukan komunal. Beberapa permasalahan

6 Nugroho Pratomo dan Novelia, *Tinjauan Kondisi Politik 2017: Mempersiapkan Tahun Politik 2019*, <https://www.validnews.id/Tinjauan-Kondisi-Politik-2017--Mempersiapkan-Tahun-Politik-2019-RRs>, diakses pada 01 Oktober 2018.

7 Suryani dan Ana Sabhana Azmy, *Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru)*, Laporan Hasil Penelitian, (Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 18.

8 Fitri Ramdhani Harahap, *Politik Identitas Berbasis Agama, Prosiding: Konflik dan Politik Identitas*, hlm. 803.

tersebutlah yang menjadi titik permasalahan dari penelitian ini.⁹

Selain itu, ada juga hasil riset dari Miftahul Khiiyarah yakni skripsinya yang berjudul “Genealogi Dan Politik Identitas (Studi Terhadap Konflik Mahasiswa Palopo Dan Bone Di Universitas Muslim Indonesia)”. Pada penjelasannya, penelitian ini membahas tentang konflik mahasiswa Palopo dan Bone yang terjadi dari tahun 1990-an, namun konflik yang besar baru terjadi dari tahun 2008 sampai dengan konflik yang terakhir terdengar pada tahun 2014 yang telah menjatuhkan beberapa korban jiwa yang cukup memprihatinkan. Penyebab dari konflik ini adalah adanya warisan konflik masa lalu dari sejarah Kerajaan Bone dan Luwu, kepentingan egoisme serta masalah individu yang kemudian dibesarkan menjadi masalah organisasi daerah sebagai wujud solidaritas. Politik Identitas pada konflik mahasiswa Palopo dan Bone ini dari hasil penelitian menjelaskan bahwa hampir keseluruhan isu dan cerita konflik yang beredar dimasyarakat begitu cepat berkembang dan itu hanya asumsi yang berkembang.¹⁰

Selain dua riset tersebut, ada juga beberapa riset lainnya yang membahas mengenai politik identitas. Muammar Achmat Tahir juga meneliti mengenai politik identitas dalam skripsinya yang berjudul “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta (Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu Pada Tanggal 27 September 2016)”. Dalam penjelasannya, penelitian ini lebih mengarah

pada bagaimana isi pidato Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung mengenai penyebutan surah al-Maidah hingga menimbulkan perselisihan dikalangan masyarakat.

Basuki memaknai penggunaan Surat al-Maidah 51 oleh oknum-oknum yang ia maksud tersebut sebagai praktik kebohongan. Wacana tentang kriteria pemimpin yang harus dipilih, secara gamblang dibahas Basuki. Wacana tersebut disampaikan dengan mengaitkannya dengan identitas rakyat sebagai warga negara. Pidato basuki tersebut menjadi masalah karena dianggap sebagai penodaan agama. Maksud Basuki sendiri dilatari oleh pandangan terkait penggunaan isu SARA yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk bersaing dengannya. Penggunaan isu SARA dalam pemilihan umum memang tidak dibenarkan di Indonesia, namun Basuki menyampaikannya dengan cara yang salah yaitu dengar kalimat yang tidak secara eksplisit menjelaskan oknum yang beliau maksud.¹¹

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research*. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji dengan mencari informasi-informasi dan data-data yang berasal dari bahan-bahan tertulis serta relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis dengan metode penelitian deskriptif-analisis. Metode penelitian

9 Suryani dan Ana Sabhana Azmy, *op.cit*, hlm. 99.

10 Miftahul Khiiyarah, *Skripsi, Genealogi Dan Politik Identitas (Studi Terhadap Konflik Mahasiswa Palopo Dan Bone di Universitas Muslim Indonesia)*, (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

11 Muammar Achmat Tahir, *Skripsi, Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta (Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu Pada Tanggal 27 September 2016)*, (Departemen Ilmu Politik Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

12 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 54.

deskriptif-analisis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengolahan data ini, yakni mendeskripsikan data dan menganalisis data. Yang dimaksud mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari data yang masih belum diolah. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah biografi beserta teknik kampanye dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut dikaitkan dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Amy Gutmann mengenai politik identitas. Sedangkan menganalisis data adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Amy Gutmann mengenai politik identitas guna mengidentifikasi politik identitas kedua pasangan calon.

Politik Identitas

Politik identitas terdiri dari dua kata, yakni politik dan identitas. Definisi politik sangat variatif, ada yang berpandangan positif dan ada yang negatif. Politik sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan, suatu proses pembuatan keputusan secara kolektif, suatu alokasi sumber daya yang langka (*the allocation of scarce resources*), atau sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh muslihat.

Menurut Ramlan Surbakti politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah

tertentu.¹³ Sama halnya pengertian yang diberikan oleh Surbakti, Andrew Heywood juga memberikan pengertian politik yakni sebagai aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara, dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka.¹⁴

Identitas itu terjadi dalam proses menjadi dalam perubahan sosial. Akhir-akhir ini masalah identitas atau politik identitas menyeruak secara fenomenal, dalam wujud yang bervariasi sekaligus mengekankan, yang dampak dari padanya juga tak terbayangkan. Pada era global saat ini carut-marut budaya dan maraknya identitas-identitas, dapat terjadi sesuatu identitas sekaligus menganut identitas yang lain. Dalam perjalanannya, identitas dalam dua kategori, yakni identitas sosial (agama, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan).

Identitas sosial menentukan posisi individu di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi individu di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan.¹⁵ Sebuah gerakan yang berlandaskan identitas dapat disebut sebagai politik identitas, tetapi dalam pengertian teori sosial dan politik, politik identitas memiliki makna yang lebih spesifik ketimbang pengertian yang luas. Politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu.

13 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 1.

14 Andrew Heywood, *Politik*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

15 Gm. Sukanto, *Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi "Lokalitas" Dan "Globalisasi")*, (Jurnal Sejarah dan Budaya, No. 2, Desember 2010), hlm. 9-14.

Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari 'kaum yang terpinggirkan' dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat. Dalam studi pasca-kolonial politik identitas sudah lama digeluti. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha, Gayatri C Spivak, dan lain-lain. Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktik politik sehari-hari.¹⁶

L.A. Kauffman pertama kali menjelaskan mengenai politik identitas dengan melacak asal-muasalnya yakni pada gerakan mahasiswa anti kekerasan yang dikenal dengan sebutan SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*). Gerakan tersebut merupakan sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an. Secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan. Di Amerika Serikat, para pengagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasan lah yang membangun kesadaran golongan yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu.¹⁷

16 Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, (*Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 3 No.1 Februari, 2012), hlm. 119-120.

17 Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Edisi Digital, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), hlm. 4.

Selain itu, cara berpolitik dengan menjual sentimen agama, ras, atau nasionalisme itu tidak dapat dipungkiri sedang berkembang luas di hampir seluruh dunia dekade ini. Perpolitikan yang telah terjadi di Amerika Serikat ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat juga menggunakan politik identitas sebagai arah dari kampanye yang dia lakukan. Banyak yang mengawatirkan masa depan dunia setelah terpilihnya Trump. Macam-macam kecemasannya antara lain dari keruntuhan Amerika Serikat, kecacauan sosial akibat kerusuhan etnis, hingga Perang Dunia III.¹⁸

Berbeda halnya dengan politik identitas di negara Iran. Politik identitas yang dilakukan di negara Iran mengarah kepada untuk membebaskan mereka dari perlakuan ketidakadilan. Jika dilihat secara historis, Republik Iran lahir dari Revolusi Islam pada tahun 1979 setelah menjatuhkan rezim yang sekuler dan lebih mendukung kepentingan negara asing (negara lain). Agenda ini dikenal dengan istilah 'ekspor revolusi'. Perilaku politis ini tidak lepas dari identitas Iran sebagai sebuah negara yang sedari semula berbasis Islam, dan memandang dirinya sebagai pusat dari dunia Islam, sehingga merasa perlu membangun suatu identitas di kawasan Timur Tengah.¹⁹

Di negara Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud

18 Bramantya Basuki, *Setelah Politik Identitas ala Trump Berjaya*, <https://tirto.id/setelah-politik-identitas-ala-trump-berjaya-b4Zu>, diakses pada 10 November 2018.

19 Naldo Helmys, *Ekspor Revolusi Islam dan Identitas Republik Islam Iran*, (*Jurnal Andalas Journal of International Studies*, Volume 5 No. 2 November, 2016), hlm. 206-207.

dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.²⁰

Black campaign melalui SARA merupakan cara yang paling mudah dan murah untuk memobilisasi massa terhadap kesimpulan dan tindakan-tindakan politik tertentu. Mobilisasi berbasis keyakinan, kesukuan, atau kelompok tertentu menjadi alat yang paling mudah untuk menyerang lawan politiknya. Pertarungan yang ketat pasti berimplikasi dengan potensi digunakannya politik identitas untuk mengalahkan lawan.²¹ Terdapat spekulasi bahwa pertarungan politik identitas yang terjadi di DKI Jakarta pada beberapa waktu yang lalu akan berpotensi terjadi di pilgub Jawa Tengah. Pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu yang berujung pada kasus hukum atas dugaan Penodaan Agama merupakan salah satu kasus dimana politik identitas bermain dengan isu agama sebagai pemicunya.

Selain itu, pilkada Bengkulu secara langsung pada 9 Desember 2015 masih sulit dilepaskan dari politik identitas kesukuan terutama latar belakang kandidat gubernur dan wakil gubernur. Masyarakat Bengkulu terdiri atas beberapa suku, di antaranya suku Serawai dan Rejang. Agusrin berasal dari salah satu suku besar di Bengkulu, yaitu suku Serawai yang keberadaan dan pengaruhnya kuat di daerah Bengkulu bagian selatan, terutama di Manna.

20 Ahmad Syafii Maarif, *op.cit*, hlm. 3.

21 Teguh Yuwono, *Waspada! Politik Identitas*, (Jurnal Suara Merdeka, Kamis, 4 Januari 2018), hlm. 1.

Politik Identitas menurut Pemikiran Amy Gutmann

Pemilu dalam demokrasi merupakan sarana yang damai dan menjadi alternatif dari cara kekerasan bagi semua kelompok dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam hal ini bisa disebut berkompetisi dalam hal perebutan kekuasaan. Penggunaan identitas dalam politik adalah sah dan belum tentu berbahaya bagi demokrasi. Dalam hal ini, tokoh yang bergelut dalam politik identitas salah satunya adalah Amy Gutmann.

Amy Gutmann adalah Presiden Universitas Pennsylvania. Sebagai Presiden Penn sejak 2004, Dr. Gutmann adalah pemimpin terkenal di dunia internasional dalam pendidikan tinggi. Dia juga seorang advokat terkemuka untuk peningkatan akses ke pendidikan tinggi, untuk inovasi berdasarkan kolaborasi lintas disiplin, dan untuk dampak transformatif dari universitas, lokal, nasional, dan global.²² Amy Gutmann membedakan tingkat keadaban politik identitas dengan menawarkan tiga kategori penggunaan identitas dalam demokrasi, yakni:²³

1. *Good*

Politik identitas bisa menjadi *good* atau bisa dikatakan mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan (*civic*) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain.

22 Mitja Sardoc, *Democratic Education at 30: An interview with Dr. Amy Gutmann*, (Jurnal *Theory and Research in Education*, Volume 16 No. 2, 2018), hlm. 244.

23 Lihat Buku Amy Gutmann, *Identity in Democracy*, (New Jersey: Princeton University Press, 2003).

2. Ugly

Politik identitas bisa menjadi *ugly* jika dalam identitas yang digunakan yakni mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain, apalagi sampai melegitimasi kekerasan.

3. Bad

Politik identitas dalam kategori ini tidak secara aktif mempromosikan kesadaran publik yang positif, akan tetapi juga tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antarkelompok identitas.

Telaah Pemikiran Amy Gutmann dalam Mengidentifikasi Politik Identitas yang digunakan Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Atmosfer dari kontestasi politik pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang sudah mulai terasa. Ada dua pasangan calon yang kini sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kubu pertama yakni Jokowi sebagai calon presiden dan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Hal ini dapat dilihat dari berita yang dilansir oleh *kompas.com*, Joko Widodo resmi mengumumkan bahwa cawapres pendampingnya dalam Pilpres 2019 adalah Ma'ruf Amin.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam jumpa pers bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pendukung di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan, "Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan men-

dampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin,"²⁴

Jika melihat biografi dari seorang Jokowi, dia dilahirkan pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Jokowi memang sederhana semasa hidupnya, sejak ia kecil hidupnya sudah dibumbui perjuangan bersama keluarga kecilnya. Latar belakang Jokowi yang sederhana membuat dirinya sangat dikenal sebagai orang yang merakyat. Keluarga dari Jokowi juga sangat sederhana sehingga masa kecil dari beliau sangat keras dari segi pendidikan formal maupun non formal. Ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, ia menekuni profesinya sebagai pengusaha meubel. Di tahun 2005 Jokowi juga terpilih menjadi walikota Solo.

Ada banyak sekali prestasi yang sudah dilakukan oleh pria ini di kota Solo. Karena melihat prestasi Jokowi yang bagus di kota Solo. Kemudian pada tahun 2012 dia dicalonkan menjadi gubernur Jakarta. Setelah jabatannya menjadi gubernur Jakarta, tentu hal ini membuat pria yang satu ini semakin sibuk. Tak sedikit juga media yang membuat berita khusus tentang Jokowi dan popularitasnya meningkat dan membuat banyak orang menginginkan Jokowi menjadi seorang presiden. Setelah melalui rangkaian pemilu yang panjang, pada akhirnya Jokowi terpilih sebagai seorang presiden Indonesia ke 7 pada periode 2014 - 2019. Usaha, tekad dan kerja keras menjadi landasan kesuksesan setiap orang. Sama halnya dengan Jokowi. Jokowi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Jokowi bahkan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia.

²⁴ Diamanty Meiliana, *Ini Profil Ma'ruf Amin, Cawapres Jokowi*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/18551651/ini-profil-maruf-amin-cawapres-jokowi>, diakses pada 9 Oktober 2018.

Jika melihat biografi dari pasangan Jokowi yakni Ma'ruf Amin, dia dilahirkan di Desa Kresak di wilayah Tangerang, Banten pada tanggal 1 Agustus 1943. Dilansir oleh *cnnindonesia.com*, silsilah keluarga Ma'ruf Amin merupakan keturunan dari ulama besar asal Banten yang pernah menjadi imam Masjidil Haram bernama Syeikh An Nawawi Al Bantani. Jika melihat dari sebelum penunjukan Ma'ruf Amin, banyak yang mengira Jokowi akan memilih Mahfud MD.²⁵ Latar belakang kuat Ma'ruf sebagai pemimpin muslim diharapkan dapat melindungi Jokowi dari kampanye hitam menggunakan agama. Pada 2014, kubu Prabowo melabeli Jokowi sebagai pemimpin yang kurang Islami karena agenda pluralismenya.

Pengalamannya yang sangat banyak di bidang agama dan juga politik mengantarkan Ma'ruf Amin menjabat sebagai Rais 'Aam atau ketua umum PBNU dari tahun 2015 hingga 2020. Selain itu beliau juga menjabat sebagai ketua MUI Pusat dari tahun 2015. Pengaruhnya yang sangat besar di organisasi masyarakat yakni Nahdlatul Ulama (NU), juga sangat memunculkan identitas seorang Ma'ruf Amin sebagai pilihan dari umat Islam khususnya para santri di Indonesia.

NU yang sudah menghegemoni umat Islam di Indonesia, juga sempat membuat pendukungnya berpikir kembali. Hal ini dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2018, Banser yang merupakan komponen dari NU melakukan pembakaran bendera hitam yang bertuliskan aksara arab yang dikira milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dilansir oleh *cnnindonesia.com*,

25 _____, *Prabowo pilih Sandiaga, Jokowi pilih Ma'ruf, kompromi politik? Ini analisis para ahli*, <http://theconversation.com/prabowo-pilih-sandiaga-jokowi-pilih-maruf-kompromi-politik-ini-analisis-para-ahli-101391>, diakses pada 18 November 2018.

Slamet menganggap tindakan Banser yang membakar bendera serupa dengan gaya kader Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa silam. Dia menyayangkan hal itu kembali terlihat di masa kini.²⁶

Melihat dari bagaimana kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor 1, dikatakan mempunyai peran positif dalam demokrasi. Paslon nomor 1 cenderung mengarah pada peran yang positif dan selalu diberitakan dengan kinerjanya yang selalu baik dan merakyat. Dalam hal ini, paslon juga tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antarkelompok identitas dan menurut hemat penulis kecenderungan paslon nomor 1 lebih mengarah pada politik identitas *good* dan *bad*. Pengaruh kebaikan yang besar dan telah diutarakan media kemungkinan dampak dari Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden di Republik Indonesia.

Tidak menutup kemungkinan bahwa paslon nomor 1 tersebut bisa mengarah kepada politik identitas yang bersifat *ugly* karena semua kinerja mereka berdua pasti dipengaruhi oleh bagaimana tim sukses dan anggota partai yang mendukung dibelakang mereka. Pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh Banser dari NU sebagai mayoritas yang akan mendukung Ma'ruf Amin, pasti akan berdampak pada masyarakat dikarenakan akan dianggap sebagai tidak adanya rasa menghargai Pluralisme. Permasalahan-permasalahan agama seperti ini, sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pemicu dari konflik politik identitas.

Sedangkan dari kubu kedua yakni Prabowo sebagai calon presiden dan Sandiaga

26 _____, *FPI Kecam Pembakaran Bendera oleh Banser Garut*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181022142047-20-340409/fpi-kecam-pembakaran-bendera-oleh-banser-garut>, diakses pada 18 November 2018.

Uno sebagai calon wakil presiden. Hal ini seperti yang dilansir oleh *tribunnews.com*, calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Dalam pengumuman di kediamannya didampingi sejumlah pimpinan partai politik pendukungnya, Prabowo terlihat mengenakan baju putih yang biasa ia kenakan di sejumlah acara.

Prabowo mengatakan, “Pimpinan 3 parpol PKS, PAN, Gerindra memutuskan dan memberi, kepercayaan kepada saya dan Sandiaga Uno untuk maju calon presiden dan wakil presiden RI untuk masa bakti 2019-2024. Saudara sekalian, kepercayaan yang diberikan adalah kepercayaan yang sangat besar dan kami sebagai anak bangsa, sebagai insan hamba Tuhan akan memohon kekuatan dari yang maha kuasa, Allah SWT agar kami tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua,”²⁷ Pemilihan Sandiaga juga tidak lepas dari berbagai spekulasi-spekulasi miring. Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kemungkinan membentuk koalisi dan memasang anak SBY yakni Agus Yudhoyono sebagai penamping Prabowo.

Melihat biografi dari seorang Prabowo Subianto, dia dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1951, Prabowo merupakan anak dari pakar Ekonomi Indonesia pada zaman Soekarno dan Soeharto yaitu Prof. Soemitro Djohadikusumo. Pada tahun 1970, Prabowo Subianto muda memulai kariernya saat ia mendaftarkan diri di Akademi Militer Magelang, Ia kemudian Lulus pada tahun 1974 dari Akademi Militer,

²⁷ _____, *Penjelasan Prabowo Terkait Penunjukan Sandiaga Uno*, <http://jogja.tribunnews.com/2018/08/09/ini-penjelasan-prabowo-terkait-penunjukan-sandiaga-uno>, diakses pada 10 Oktober 2018.

kemudian pada tahun 1976, ia ditugaskan sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Setelah kembali dari Timor Timur, karir militernya Prabowo terus melejit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus).

Singkat cerita, pada Mei 1998 menurut kesaksian BJ. Habibie dalam bukunya yang berjudul ‘Detik Detik Menentukan’ serta kesaksian purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie. Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo.

Tidak hanya masalah di atas, Wiranto juga mengomentasi mengenai latar belakang Prabowo yang terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998. Dilansir oleh *voaindonesia.com*, Wiranto mengatakan, “Selaku Panglima ABRI saat itu atas kasus itu saya kemudian melakukan pengusutan dan penghukuman kepada para pelaku penculikan. Letjen Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), oleh DKP yang saya bentuk, telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Maka DKP dari hasil penyelidikan kasus penculikan 1998 merekomendasikan Panglima Kostrad waktu itu diberhentikan dari dinas keprajuritan”.²⁸

²⁸ Andylala Waluyo, *Wiranto Pastikan Keterlibatan Prabowo Dalam Penculikan 1998*,

Setelah berhenti berkarier dari dunia Militer, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungannya menjadi seorang Pengusaha mengikuti jejak adiknya yaitu Hashim Djojohadikusumo. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Perusahaan Kertas yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Selain mengelola Kiani Kertas, yang kini menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.

Setelah sukses menjadi seorang pengusaha, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungan kariernya di bidang politik, Berbekal pengalaman serta reputasinya. Dalam biografi Prabowo Subianto diketahui bahwa ia sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto. Kemudian pada tahun 2009, Prabowo Subianto memulai peruntungannya kembali menjadi Calon Presiden pada pemilu 2009 namun, ia akhirnya menjadi Calon wakil Presiden mendampingi Megawati yang maju menjadi Calon Presiden Republik Indonesia.

Di pemilu 2014 Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Ia memilih Hatta Rajasa yang berasal dari Partai Amanat Nasional sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kini Prabowo

kembali diusung sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019. Kali ini ia maju bersama dengan Sandiaga Uno sebagai calon Presiden pada pilpres 2019 mendatang. Latar belakang dan kekuatan Sandiaga terletak pada usia yang relatif muda yang diharapkan dapat mempengaruhi para pemilih milenial. Sebagai pengusaha sukses, Sandiaga mungkin juga menguntungkan Prabowo dalam hal dukungan keuangan untuk kampanye.

Kembali melihat biografi dari pasangan Prabowo yang menjadi calon wakil presiden yakni Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga merupakan salah satu pendiri Saratoga Capital, sebuah perusahaan investasi yang didirikan bersama Edwin Soeryadjaya (anak dari perintis Grup Astra, William Soeryadjaya) pada tahun 1998. Saratoga Capital berkonsentrasi dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Saat ini ia menjabat sebagai CEO Saratoga Capital dan juga pimpinan di beberapa perusahaan antara lain PT. Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, PT. Tower Bersama Infrastruktur Group Tbk., perusahaan penyedia menara telekomunikasi.

Ia juga salah satu pendiri PT. Recapital Advisors, sebuah perusahaan pengelola aset yang didirikan pada tahun 1997 bersama teman sekolahnya, Rosan Roeslani. Semua kunci kesuksesan Sandiaga Sallahudin Uno ini berangkat dari mindset dan cara pandang beliau bahwasannya Indonesia mampu untuk bangkit dan memiliki SDM yang berkualitas serta setara levelnya dengan dunia Internasional dengan Visi "Waktunya Indonesia Setara".²⁹

²⁹ Rahmat Taufik, *Perjalanan Kesuksesan Hidup Seorang Sandiaga Shalahudin Uno*, Tugas Semester Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi, <http://www.dtx.yolasite.com/resources/Rahmat%20Taufik%20%28Bp.07.028%29%20Tugas%20Biogra>

<https://www.voaindonesia.com/a/wiranto-pastikan-keterlibatan-prabowo-dalam-penculikan-1998/1940342.html>, diakses pada 18 November 2018.

Melihat dari bagaimana kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor 2, dikatakan mempunyai peran positif dalam demokrasi, pasangan ini menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik. Akan tetapi, Pak Prabowo yang memiliki watak keras sering menyerukan kalimat-kalimat yang kontroversial sehingga menimbulkan multitafsir dan kesalahpahaman di masyarakat Indonesia. Sedangkan dari pasangannya yakni Pak Sandi lebih menyerukan bagaimana ekonomi masyarakat Indonesia bisa lebih mandiri serta dapat berkompetisi dengan negara-negara di luar Indonesia. Menurut penulis kecenderungan paslon nomor 2 lebih mengarah pada politik identitas *ugly* dan *bad*. Kinerja yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 ini juga, pasti dipengaruhi bagaimana tim kampanye serta orang-orang partai yang mendukung mereka di pemilihan umum tersebut.

Perjalanan dari kedua pasangan tersebut, sangat dipengaruhi oleh berbagai media dan kepentingan yang mendukung di belakangnya. Mengutip tulisan artikel di dalam *tirto.id*, peneliti Remotivi Muhamad Heychael mengatakan tak lama setelah Erick Thohir bergabung di dalam kubu Jokowi bahwa, "Di AS, dukungan media terhadap calon presiden dilandasi nilai dan gagasan yang membentuk identitas media. Di Indonesia, dukungan lahir karena kepentingan pemilik media". Dengan bergabungnya Thohir, pasangan Jokowi-Ma'ruf terlihat lebih perkasa menjelang pemilu. Pasaunya, kubu Jokowi-Ma'ruf sudah memiliki bekingan kuat dari dua pemilik jaringan media raksasa, Hary Tanoesoedibjo dan Surya Paloh. Menurut Heychael, kongsi penguasa dan gurita media saat ini dapat menciptakan ketimpa-

ngan informasi. Publik adalah pihak yang paling dirugikan.³⁰

Jika dirinci mengenai media yang sudah disinggung di atas, antara lain Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik dari MNC Group yang terdiri dari RCTI, MNC TV, Global TV, Koran Sindo, Okezone, dan INews TV. Hary Tanoesoedibjo adalah Ketua Umum Partai Perindo yang merupakan Partai Koalisi dari Kubu Jokowi-Ma'ruf. *Kedua*, Surya Paloh merupakan pemilik dari Media Group yang membawahi Media Indonesia dan Metro TV. Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai Nasdem yang merupakan Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf. Bisa dilihat sangat jelas bahwa, kedua media tersebut pasti akan mendukung tokoh yang didukungnya.

Yang perlu ditekankan kepada pembaca dan masyarakat adalah tidak semua dari media-media yang beredar memiliki keberpihakan kepada salah satu dari pasangan calon, akan tetapi Kita sebagai masyarakat harus bertindak dan berpikir cerdas karena semua keberpihakan maupun yang menentang bisa kita pilah dengan tidak melihat politik tidak hanya dengan satu sudut pandang. Pengaruh selanjutnya mengenai kepentingan yang mendukung di belakang kedua pasangan calon tersebut. Permasalahan ini juga sangat erat kaitannya dengan politik identitas yang mengarah pada isu SARA.

Prabowo sering menuding kubu Jokowi mengenai sistem ekonomi Indonesia yang tidak berpihak kepada orang kecil atau ia menyebutnya sebagai sistem neoliberal. Prabowo juga menegaskan, sistem ekonomi yang demikian memberi jalan

30 Ign. L. Adhi Bhaskara, "Bukan Gagasan, Apalagi Nilai": Keberpihakan Bos Media tiap Pilpres, <https://tirto.id/bukan-gagasan-apalagi-nilai-keberpihakan-bos-media-tiap-pilpres-cZSZ>, diakses pada 16 November 2018.

fi%20Pengusaha%20Sukses.pdf, diakses pada 11 Oktober 2018.

agar sebagian orang menjadi kaya dan berharap kekayaan tersebut akan turun kepada orang-orang yang di tataran ekonomi ke bawah. Akan tetapi, masalahnya kapan kekayaan tersebut akan turun ke masyarakat ekonomi ke bawah.³¹ Tudingan yang dilakukan Prabowo terhadap Jokowi seringkali memicu kegaduhan. Tidak hanya masalah di atas, kelompok oposisi juga menuduh kebijakan mengenai penggratisan Tol Jembatan Suramadu sebagai pencitraan calon presiden Jokowi demi meraup suara masyarakat Madura di pilpres tahun depan. Namun pendukung Jokowi menyebut tuduhan itu terlalu berlebihan dan lebih didasari pertimbangan politik.³²

Selain hal tersebut, Jokowi kerap juga dituding sebagai antek asing sampai dengan dituding sebagai seorang PKI (Partai Komunis Indonesia). Beberapa tudingan tersebut tidak hanya berasal dari kubu Prabowo, tetapi juga berasal dari sumber-sumber yang tidak diketahui keberadaannya. Tudingan-tudingan yang bersifat negatif seperti beberapa data di atas, menimbulkan adanya kecenderungan kubu Prabowo mengarah pada politik identitas yang bersifat *ugly*. Persaingan di dalam perpolitikan sangat wajar jika partai oposisi dari kubu sebelah memberikan kritik membangun sampai dengan kritik yang berupa tudingan. Akan tetapi, sangat disayangkan jika kedua kubu tersebut malah lebih sering melakukan tudingan-tudingan negatif sampai dengan menjatuhkan dan memberikan kritik ter-

hadap identitas bukan dari kinerja kedua pihak tersebut.

Kondisi politik yang telah terjadi belakangan ini juga sangat dipengaruhi oleh identitas agama dari kedua belah pihak. Melihat paslon nomor 1 yang sangat kuat pendukungnya dari agama Islam khususnya kaum santri. Dalam hal ini, Ahmad Syafii Maarif berpendapat Politik yang seharusnya digunakan dalam agama Islam seharusnya lebih menekankan pada nilai-nilai substantif Islam seperti kesejahteraan, persamaan, keadilan, dan kebebasan.³³ Akan tetapi, selalu saja agama dijadikan sebagai alat dalam memicu konflik dan merupakan sebuah pendongkrak suara dalam memenangkan kontestasi politik. Kita bisa melihat bagaimana politik identitas mengenai agama sangat kuat di sini.

Seperti halnya kasus Ahok yang melakukan penistaan agama Islam, permasalahan agama itu sangat cepat menyebar dan sangat kuat dalam mengumpulkan massa dengan latar belakang untuk membela agama. Kasus mengenai Jokowi yang dituduh sebagai pengkriminalisasi ulama oleh beberapa pihak juga salah satu contoh dari politik identitas yang berlatar belakang agama. Tidak hanya paslon nomor 1 yang selalu bermasalah mengenai politik identitas yang berlatar belakang agama, tetapi paslon nomor 2 juga. Prabowo yang sebenarnya sangat kuat dalam mendekati kaum santri dan ulama, malah tidak menggunakan agama dalam mendongkrak suara. Permasalahan ini sangat dipengaruhi karena Prabowo keluar dari ijtihad para ulama.

Spekulasi-spekulasi miring yang terjadi juga malah mengarah pada latar belakang kehidupannya serta ekonomi yang

31 Tony Firman, *Neoliberalisme di Antara MUI, Prabowo dan Jokowi*, <https://tirto.id/neoliberalisme-di-antara-mui-prabowo-dan-jokowi-CHbW>, diakses pada 16 November 2018.

32 _____, *Jembatan Suramadu 'digratiskan', tuduhan 'pencitraan' dan atmosfer pilpres*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46010177>, diakses pada 16 November 2018.

33 Ahmad Sholikin, *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*, (*Jurnal Politik Muda*, Volume 2 No.1, Januari-Maret 2012), hlm. 200.

digunakan sebagai politik identitas dalam menjatuhkan suara. Syafii juga menekankan dalam pelaksanaan politik Islam, umat Islam harus menjunjung tinggi moral dalam melakukan kontestasi yang berkaitan dengan politik. Perdamaian yang selalu diutarakan oleh agama Islam, seharusnya tidak hanya sebatas diucapkan dan berakhir diperkataan, akan tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan berpolitik.

Kembali terhadap konflik politik identitas yang dilakukan kedua kubu tersebut, konflik yang terjadi selama ini dikarenakan adanya benturan dari kepentingan materi. Perpecahan yang dialami dalam situasi konflik sering membutuhkan pertukaran simbol sosial dan strategi resolusi konflik ini mengajukan konsep khas perdamaian, yang menerangi syarat dan kondisi yang diperlukan untuk harmoni sosial yang bisa dipahami dan dirasakan.³⁴ Kedua kubu yang berseteru dalam pergulatan politik ini, seharusnya kembali kepada tujuan awal dari demokrasi yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Konflik yang terjadi jangan hanya selalu terfokus pada identitas dengan saling menjatuhkan akan tetapi mengarah pada hal yang lebih baik lagi.

Nurcholis Madjid (Cak Nur) dalam pemikirannya, juga sangat menjunjung mengenai pluralisme dan perdamaian. Cak Nur juga menyatakan bahwa Indonesia bisa maju dan berkembang jika adanya persatuan dari pemegang kekuasaan dan para pihak yang terlibat di dalam perpolitikan sehingga dengan adanya persatuan maka arah kemajuan dari Indonesia bisa searah. Akan tetapi, pasti akan selalu ada yang namanya perseteruan dan pertentangan dari kedua belah pihak. Pertentangan

yang terjadi kembali lagi kepada faktor-faktor yang berada dibalik kepentingan dari pihak yang berkuasa tersebut.

Peran dari masyarakat awam sebagai pihak yang menerima hasil dari kekuasaan juga harus berani mengkritik dan menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang berkuasa. Jika masyarakat hanya diam dan menerima, hal tersebut tidak akan memberikan dampak yang bisa membawa masyarakat tersebut menuju pada kesejahteraan. Selain masyarakat awam, mahasiswa sebagai kaum akademisi juga harus berani menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan inovasinya terhadap pemerintah. Mahasiswa yang sering dikatakan sebagai pembawa perubahan dan pengontrol pemerintahan, tidak boleh termakan isu yang membawa mereka kepada sifat yang anarkis dan malah menyerukan kepada perpecahan dari kedua belah pihak.

Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia harus kembali kepada falsafah negara Indonesia yakni Pancasila. Dalam sila ketiga, sangat jelas bisa kita lihat bahwa yang diinginkan oleh para pendiri dari Republik Indonesia yakni adanya Persatuan Indonesia. Persatuan yang ada dalam Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai tulisan dan tidak dimaknai sebagai falsafah negara.³⁵ Tetapi, harus juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dan kehidupan berpolitik di Indonesia. Kembali lagi penulis mengutarakan bahwa, perdamaian secara total sangatlah susah dicapai dan jika melihat keadaan yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, perbedaan ada dikarenakan pemerintahan selalu membutuhkan kritik dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai tujuan politik yang telah direncanakan.

34 Akhmad Rifa'i, *Konflik dan Resolusinya dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Millah Edisi Khusus Desember 2010), hlm. 174-175.

35 Solichin, *Wasiat Sang Begawan: Pesan-Pesan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2011), hlm. 3.

Penutup

Demokrasi merupakan sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, *pertama*, pemerintahan dari rakyat, *kedua*, pemerintahan oleh rakyat dan *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat. Para ahli ada yang berpendapat bahwa demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di mana individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Gagasan yang memandang demokrasi sebagai suatu sistem untuk memproses konflik di mana partai yang kalah dalam pemilu tidak berusaha merusak rezim demi mencapai tujuannya.

Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji-janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Perebutan kursi kekuasaan ini memuncak dengan adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 mendatang. Dalam perpolitikan di Indonesia, identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.

Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin. Kecenderungan kubu pasangan calon nomor 1 yakni Jokowi-Ma'ruf cenderung

mengarah pada peran yang positif dan selalu diberitakan dengan kinerjanya yang selalu baik dan merakyat dan ini adalah politik identitas yang mengarah pada *good*.

Kecenderungan dari kubu pasangan calon nomor 2 yakni Prabowo-Sandi, lebih sering memunculkan tudingan-tudingan yang bersifat negatif seperti beberapa data di atas, menimbulkan adanya kecenderungan kubu Prabowo mengarah pada politik identitas yang bersifat *ugly*. Persaingan di dalam perpolitikan sangat wajar jika partai oposisi dari kubu sebelah memberikan kritik membangun sampai dengan kritik yang berupa tudingan. Akan tetapi, sangat disayangkan jika kedua kubu tersebut malah lebih sering melakukan tudingan-tudingan negatif sampai dengan menjatuhkan dan memberikan kritik terhadap identitas bukan dari kinerja kedua pihak tersebut.

Daftar Pustaka

- Andylala Waluyo. *Wiranto Pastikan Keterlibatan Prabowo Dalam Penculikan* 1998. <https://www.voaindonesia.com/a/wiranto-pastikan-keterlibatan-prabowo-dalam-penculikan-1998/1940342.html>. diakses pada 18 November 2018.
- Bramantya Basuki. *Setelah Politik Identitas ala Trump Berjaya*. <https://tirto.id/setelah-politik-identitas-ala-trump-berjaya-b4Zu>. diakses pada 10 November 2018.
- Diamanty Meiliana. *Ini Profil Ma'ruf Amin, Cawapres Jokowi*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/18551651/ini-profil-maruf-amin-cawapres-jokowi>. diakses pada 9 Oktober 2018.
- Dian Rosdiani. *Kondisi Politik Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/dianrosdiani/5511230e8133117341bc61a6/kondisi-politikindonesia>. diakses pada 30 September 2018.
- Gutmann, Amy. 2003. *Identity in Democracy*. (New Jersey: Princeton University Press).

- Haboddin, Muhtar. 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. (Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 No.1 Februari).
- Harahap, Fitri Ramdhani. *Politik Identitas Berbasis Agama*. Prosiding: Konflik dan Politik Identitas.
- Haridison, Anyualatha. 2013. *Pembangunan Politik: Demokrasi, Governance Dan Supremasi Hukum*. (Jurnal Administrasi Publik, FISIP Universitas Palangka Raya).
- Helmys, Naldo. 2016. *Ekspor Revolusi Islam dan Identitas Republik Islam Iran*, (Jurnal Andalas Journal of International Studies, Volume 5 No. 2 November).
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. terj. Ahmad Lintang Lazuardi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ign. L. Adhi Bhaskara. "Bukan Gagasan, Apalagi Nilai": Keberpihakan Bos Media tiap Pilpres. <https://tirto.id/bukan-gagasan-apalagi-nilai-keberpihakan-bos-media-tiap-pilpres-cZSZ>. diakses pada 16 November 2018.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Edisi Digital. (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi).
- Miftahul Khyarah. 2017. *Genealogi Dan Politik Identitas (Studi Terhadap Konflik Mahasiswa Palopo Dan Bone di Universitas Muslim Indonesia)*. Skripsi. (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin. Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Muammar Achmat Tahir. 2018. *Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta (Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu Pada Tanggal 27 September 2016)*. Skripsi. (Departemen Ilmu Politik Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan).
- Nugroho Pratomo dan Novelia. *Tinjauan Kondisi Politik 2017: Mempersiapkan Tahun Politik 2019*. [https://www.validnews.id/Tinjauan-Kondisi-Politik-2019-RRs](https://www.validnews.id/Tinjauan-Kondisi-Politik-2017--Mempersiapkan-Tahun-Politik-2019-RRs). diakses pada 01 Oktober 2018.
- Rahmat Taufik. *Perjalanan Kesuksesan Hidup Seorang Sandiaga Shalahudin Uno, Tugas Semester Kewirausahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi*. <http://www.dtx.yolasite.com/resources/Rahmat%20Taufik%20%28Bp.07.028%29%20Tugas%20Biografi%20Pengusaha%20Sukses.pdf>. diakses pada 11 Oktober 2018.
- Rifa'i, Akhmad. 2010. *Konflik dan Resolusinya dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Millah Edisi Khusus Desember).
- Sardoc, Mitja. 2018. *Democratic Education at 30: An interview with Dr. Amy Gutmann*. (Jurnal Theory and Research in Education. Volume 16 No. 2).
- Solichin. 2011. *Wasiat Sang Begawan: Pesan-Pesan Nurcholis Madjid*. (Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation).
- Sholikin, Ahmad. 2012. *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif"*. (Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret).
- Sulisworo, Dwi. dkk. 2012. *Demokrasi*. (Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan: Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional).
- Suryani dan Ana Sabhana Azmy. 2016. *Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru)*. Laporan Hasil Penelitian. (Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo).
- Sukanto, Gm. 2010. *Politik Identitas (Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi "Lokalitas" Dan "Globalisasi")*, (Jurnal Sejarah dan Budaya. No. 2, Desember 2010).
- Tony Firman. *Neoliberalisme di Antara MUI, Prabowo dan Jokowi*. <https://tirto.id/neoliberalisme-di-antara-mui-prabowo-dan-jokowi-CHbW>. diakses pada 16 November 2018.

Yuwono, Teguh. 2018. *Waspada! Politik Identitas*. (Jurnal Suara Merdeka, Kamis, 4 Januari).

_____. *FPI Kecam Pembakaran Bendera oleh Banser Garut*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181022142047-20-340409/fpi-kecam-pembakaran-bendera-oleh-banser-garut>. diakses pada 18 November 2018.

_____. *Jembatan Suramadu 'di-gratiskan', tuduhan 'pencitraan' dan atmosfer pilpres*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46010177>. diakses pada 16 November 2018.

_____. *Menimbang Prestasi dan Ekspektasi dari Nomor Urut Pilpres*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180922120310-32-332283/menimbang-prestasi-dan-ekspektasi-dari-nomor-urut-pilpres>. diakses pada 10 Oktober 2018.

_____. *Penjelasan Prabowo Terkait Penunjukan Sandiaga Uno*. <http://jogja.tribunnews.com/2018/08/09/ini-penjelasan-prabowo-terkait-penunjukan-sandiaga-uno>. diakses pada 10 Oktober 2018.

_____. *Prabowo pilih Sandiaga, Jokowi pilih Ma'ruf, kompromi politik? Ini analisis para ahli*. <http://theconversation.com/prabowo-pilih-sandiaga-jokowi-pilih-maruf-kompromi-politik-ini-analisis-para-ahli-101391>. diakses pada 18 November 2018.

